

DAFTAR BACAAN

a) Sumber Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Aminuddin Ilmar 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Allan, McChesney, 2003, *Memajukan dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Insist Pers, Yogyakarta.
- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum*, Intrans Publishing, Malang.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII.
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- H.M. Arief Mulyadi, 2010, “Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi Dalam Negara Republik Indonesia”, Jakarta: Prestasi Putra Karya.
- Indro Sugianto, 2006, *Class Action*, Malang: Intrans.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2012 “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, Bandung, Penerbit Nuansa.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, 2017, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia.
- Jowef Ruiwu Kaho, 2012 *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Kansil, dkk, 2009, *Modul Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mashood A Baderin, 2007, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

- Mas Achmad Santoso, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Kelompok*. ICEL, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Osgar S Matompo dkk, 2018, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Intrans Publishing, Malang.
- Paul S Baut,. Dkk, 1988, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2010.
- PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, 2000, *Demokerasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Press.
- Ramlan Subakti, 2001, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara, 6th ed*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- S.F. Marbun, 2018, *Hukum Administrasi Negara 1*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksar, Jakarta.
- Yayasan Al-Sofwa, 2010, *Ada apa dengan Valentines Day?*, Jakarta: Yayasan Al Sofwa.
- Zainal Abidin, dkk, 2009, *Melanggar Tanpa Membatasi*, CRCS UGM, Yogyakarta.

b) Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2005 Tentang Kovenan Hak Ekonomi Sosial
dan Budaya

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Komentar Umum Hak sipil dan politik

Komentar Umum Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat.

Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat

c) Jurnal dan Internet

Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat
pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD” 1945,
Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Tahun 2015

Agus Budi Susilo, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan atau
Pejabat Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2
Juli 2013.

- Amrizal J Prang, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 03 Nomor 02 Tahun 2013.
- Arif Havas Oegroseno "UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR", *Indonesian Journal Of International Law*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2007.
- Bambang Heri Supriyanto," Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.
- Bambang Arwanto. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Yuridika*. Vol. 30. No. 1. Januari 2015.
- Bagus Oktafian Abriant Dkk, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Negara Hukum*: Vol. 11, No. 1, Juni 2020.
- Desri Tiara Salsabila, "Sumber Kewenangan Pemerintahan", *Jurnal OSFPREPINT*, Vol 1 No. 30 Tahun 2020.
- Eassy Syam, Valentine day: Hegemoni Budaya dan Kapitalis "Jurnal Ilmu Budaya", Vol 3 Nomor 2 Tahun 2007.
- Estika Rindiani, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Researchgate.net*, Tahun 2019.
- H. Ujang Abdullah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Artikel Hukum PTUN Palembang*.
- Herbeitus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob Oleh Pemerintah Provinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009.
- Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015.
- Iga Rusiawati, *Preferensi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Tentang Valentine's Day Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial, Dan Religi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

- Imelda Irina Evangelista Randang, “Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut Kuhap”, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018.
- Imelda Onibala, “Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.I/No.2 Tahun 2013.
- M. Addi Fauzani, “Problematic Penyelesaian Sengketa PMH Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia, *Jurnal Widya Pratama Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2020.
- Mastur Thoyib Kesi, *Perayaan Valentines Day Dalam Perspektif Pendidikan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor*, Vol 1 Tahun 2014.
- Masribut Sardol, S. “Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia”, *Rechtsidee Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, No. 1 Vol 1 Tahun 2014.
- Mifta Farid, dkk, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, e *Journal Lentera Hukum Universitas Jember*, Vol 4 No. 2 Tahun 2017.
- Muhammad Addi Fauzani dkk, *Problematic Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia*, *Jurnal Widya Pranata Hukum* Vol.2 Nomor 1 Februari 2020. Moh. Ali Burhan, “Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar Di Kota Kediri”, *Skripsi IAIN Tulungagung*, Tahun 2019.
- Muwaffiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Muhardi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik, DEMOKRASI* Vol. IV No.1 Th. 2005.
- Ni Ketut Hevy Yushantini, *Tinjauan Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020.

- Nuraeni, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Pertanian”, Skripsi Universitas Hasanudin 2016.
- Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan Di Kota Palangka Raya, “MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum” Volume 5, Nomor 2, Tahun 2019.
- Reno Apriansyah, “Valentine’s day: Jalan Penghancur Islam, Bukan hari kasih sayang”, *Artikel Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 9 Februari 2007.
- Rival Aggriawan Mainur, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu Di Indonesia, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2016.
- Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.
- Sebedeus Hitokdana, “Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Indonesia Asal Papua Di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua” *Jurnal Hukum Fakultas Atmajaya Yogyakarta*, 2014.
- Suparman Marzuki, “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Desember Tahun 2013.
- Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Nurani Hukum*, No. 1 Vol. 1 Tahun 2018.
- Syahbandi, “Perlindungan Hukum Atas Korban Pelanggaran Ham Berat Menurut Tinjauan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Masalah Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi”, *SKRIPSI Fakultas Hukum Untag Surabaya*, Tahun 2016.
- Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, *Humanika*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2013.

- Victor Imanuel W. Nalle, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47 No. 3 Tahun 2016.
- Wahyudi Djafar, “Memerhatikan perlindungan hak atas privasi dalam pengaturan dan praktik penyadapan di Indonesia” *Elsam*, 2014.
- Yokotani, “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung”, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
- Asumsi “Sejak Kapan Berduaan di kamar jadi urusan Negara”<https://www.asumsi.co/post/sejak-kapan-berduaan-di-kamar--hotel-jadi-urusan-negara>. Diakses pada tanggal 29 April 2020
- Cempaka, Mahisa, “Fakta Tak Banyak Diketahui: Satpol PP Gerebek Pasangan di Luar Nikah Itu Melanggar Hukum”.
https://www.vice.com/amp/id_id/article/939d37/satpol-pp-tak-berhak-grebek-pasangan-di-luar-nikah. Diakses pada tanggal 29 Desember 2020.
- Ega Krisnawati "Kapan Hari Valentine 2021 & Bagaimana Sejarah Asal Usul Valentine?", <https://tirto.id/kapan-hari-valentine-2021-bagaimana-sejarah-asal-usul-valentine-gafc> diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Helfi, “4 Asas-Asas Pemerintahan Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 di Indonesia”, <https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> diakses pada tanggal 21 Maret 2021
- Irena Handono, “Sejarah Valentine Day, Maksiat Berbungkus Hari Kasih Sayang” https://caridokumen.com/queue/sejarah-valentine-day-maksiat-berbungkus-hari-kasih-sayang-_5a45ed1cb7d7bc7b7ae05ff9_pdf?queue_id=-1 diakses pada tanggal 20 maret 2021.

LBH Jakarta “Logika Terbalik Negara Dalam Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik”

<https://bantuanhukum.or.id/logika-terbalik-negara-dalam-pemenuhan-hak-sipil-dan-politik/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021

Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang

<https://paralegal.id/pengertian/pemerintahandaerah/#:~:text=Pemerintahan%20Daerah%20adalah%20penyelenggaraan%20urusan,dalam%20Undang%20DUndang%20Dasar%20Negara> Diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

Tim Berita Anak Surabaya Kumparan

<https://jatim.suara.com/read/2020/02/15/040500/rayakan-valentine-19-pasangan-tak-resmi-diciduk-satpol-pp-kota-surbaya> Diakses pada 2 Maret 2020.

Yulaika Ramadhani "Asal Mula & Sejarah Valentine: Perayaan Gereja Hingga

Festival Roma", <https://tirto.id/asal-mula-sejarah-valentine-perayaan-gereja-hingga-festival-roma-eytn> diakses pada tanggal 20 Maret 2021.